

## **MENYELAMATKAN IDENTITAS SOSIAL DAN BUDAYA: STUDI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DI WILAYAH RAWAN BANJIR BANTARAN SUNGAI CITARUM KABUPATEN BANDUNG**

**Erna Suminar**

ernasuminarix@gmail.com, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

***Abstract.** In Bale Endah District, Bandung Regency, perceptions of flooding are influenced by government information about relocation and the social and cultural identity of the local river basin community. Every rainy season, the community is aware of the danger of flooding that threatens their property and lives, but they are reluctant to move from the environment in which they live. This study aims to analyze the community's interpretation of government information and their attitude towards these appeals. Qualitative research using case studies was conducted to analyze the community's perceptions of relocation and government appeals in dealing with flooding. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, observations, and literature reviews. The results of the study show that the rejection of relocation is due to emotional attachment to the place as part of their social and cultural identity. They view the place as part of their lives and livelihoods. Floods are a fate they must face despite the government's ongoing efforts to address the issue. The findings of this study suggest that effective communication requires the integration of social and cultural identity as a communication strategy in environmental messages.*

***Keywords:** Cultural Identity; Environmental Communication; Flood-Prone Area Mitigation; River Basin Communities; Social Identity*

**Abstrak.** Di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, persepsi masyarakat terhadap banjir dipengaruhi oleh informasi pemerintah mengenai relokasi serta identitas sosial dan budaya komunitas daerah aliran sungai setempat. Setiap musim hujan, masyarakat menyadari bahaya banjir yang mengancam harta benda dan nyawa mereka, tetapi mereka enggan pindah dari lingkungan tempat tinggal mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi masyarakat terhadap informasi pemerintah dan sikap mereka terhadap seruan-seruan tersebut. Penelitian kualitatif menggunakan studi kasus dilakukan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap relokasi dan seruan pemerintah dalam penanganan banjir. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan terhadap relokasi disebabkan oleh keterikatan emosional terhadap tempat tersebut sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya mereka. Mereka memandang tempat tersebut sebagai bagian dari kehidupan dan mata pencaharian mereka. Banjir dianggap sebagai takdir yang harus dihadapi meskipun ada upaya pemerintah yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut. Temuan penelitian ini

menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif memerlukan integrasi identitas sosial dan budaya sebagai strategi komunikasi dalam pesan lingkungan.

**Kata Kunci:** Identitas Budaya; Komunikasi Lingkungan; Mitigasi Daerah Rawan Banjir; Komunitas Daerah Aliran Sungai; Identitas Sosial

## **PENDAHULUAN**

Banjir merupakan bencana alam yang menjadi penyebab dampak luas dan kompleks. Peristiwa hujan ekstrem merupakan penyebab utama sungai banjir. Peristiwa ini dapat menyebabkan peningkatan volume air yang cepat sehingga melampaui kapasitas sungai (Degeai et al., 2022; Mehmood et al., 2021; Zurqani et al., 2025). Berbagai macam penyebab terjadinya banjir, di antaranya adalah perubahan penggunaan lahan. Urbanisasi dan penggundulan hutan meningkatkan permukaan kedap air, mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air dan meningkatkan limpasan ke sungai (Das & Sahoo, 2025).

Modifikasi penataan aliran sungai, tanggul dan bendungan dapat memengaruhi dinamika banjir, dan struktur ini seringkali tidak efektif untuk banjir ekstrem dan terkadang dapat memperburuk banjir pada daerah tertentu (Korkmaz, 2022). Perubahan iklim menyebabkan curah hujan lebih sering dan intens, yang berkontribusi pada peningkatan risiko banjir. Suhu yang lebih hangat dapat meningkatkan kapasitas atmosfer untuk menahan uap air, yang menyebabkan hujan deras (Lo et al., 2021). Strategi komunikasi lingkungan sangat mendesak, sehingga memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah dan masyarakat lokal.

Bale Endah Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang dialiri Sungai Citarum. Penelitian menunjukkan bahwa daerah ini telah menerima banjir berulang setiap tahun. Kedua daerah itu terletak di daerah rendah, sehingga rentan terhadap luapan air saat hujan lebat (Anita et al., 2025; Wijaya & Wijayanti, 2024). Dampak dari fenomena ini mengganggu aktivitas masyarakat, merusak bangunan dan menghancurkan infrastruktur jalan yang menyebabkan kerugian secara signifikan (Anita et al., 2025; Kombaitan et al., 2018). Kelompok masyarakat yang rentan, khususnya yang berada di daerah dengan kondisi kurang mampu, menghadapi risiko yang lebih tinggi (Anita et al., 2025).

Komunikasi lingkungan dan relokasi karena banjir - menunjukkan pemerintah yang top-down berimpilikasi kepada pesan-pesan lingkungan yang bertentangan dengan pemahaman masyarakat tentang tempat tinggal mereka (Duijn et al., 2006). Belajar dari kasus Jakarta, perjuangan kaum marjinal untuk mempertahankan tempat tinggalnya menggambarkan bagaimana pesan-pesan lingkungan dapat bertentangan dengan pengalaman hidup dan persepsi masyarakat setempat (Goh, 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya memperlihatkan, adanya kontradiksi dalam pesan lingkungan di mana terdapat keterikatan masyarakat dengan rumah dan kondisi sosial ekonomi mereka dapat menyebabkan penolakan terhadap relokasi, bahkan di tengah risiko lingkungan (Carrasco & Dangol, 2019). Terdapat konflik kepentingan antara pembangunan perkotaan dan kebutuhan masyarakat marginal menyoroti kompleksitas komunikasi dan tata kelola lingkungan (Carrasco & Dangol, 2019).

## **KAJIAN TEORITIS**

Teori komunikasi lingkungan digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami masalah lingkungan, di mana komunikasi dipandang sebagai alat pragmatis dan konstitutif untuk memecahkan masalah lingkungan. Komunikasi membantu eksplorasi hubungan

manusia dengan alam dan varian budayanya dan ekspresi bahasa yang digunakan di wilayahnya (Pezullo & Cox, 2018 :36).

Makna sosial dibentuk oleh interaksi melalui simbol dan bahasa yang menciptakan identitas sosial dan budaya. Interaksi simbolik adalah proses yang menghidupkan makna dan nilai timbal balik dengan bantuan simbol-simbol dalam pikiran (Aksan et al., 2009). Wilayah tempat tinggal, sungai, rumah tidak memiliki makna sendiri, melainkan mendapatkan maknanya dari aktor sosial.

Komunikasi partisipatoris diperlukan untuk membangun komunikasi dialogis di mana masyarakat dan pemerintah bersinergi dalam pemecahan masalah dan pemberdayaan masyarakat yang berakar pada identitas sosial dan identitas budaya sehingga masyarakat dapat menjaga lingkungan sungai dan sigap menghadapi banjir. Contoh penerapan komunikasi lingkungan partisipatoris adalah bagaimana masyarakat Wingham di MidCoast, New South Wales, Australia bergantung pada jaringan kerjasama dengan penggunaan pengetahuan lokal dan merancang solusi ketika menghadapi bencana alam (Harris, 2025). Komunikasi dialogis sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Wachinger et al., 2018). Sehingga kedua pihak dapat menemukan cara terbaik sebagai solusi.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengeksplorasi pesan-pesan lingkungan yang diterima oleh masyarakat yang memengaruhi penolakan relokasi. Studi kasus digunakan ketika peneliti ingin menyajikan uraian menyeluruh dan menyajikan pandangan subjek yang diteliti (Lincoln & Guba, 1985). Pendekatan ini bermanfaat karena membantu peneliti memahami identitas sosial dan budaya yang membentuk respons pada pesan-pesan lingkungan. Dengan demikian, persepsi tentang banjir tidak hanya dibentuk oleh pesan-pesan lingkungan, melainkan juga oleh faktor-faktor sosial, budaya dan ekonomi.

Penelitian dilakukan di Bale Endah, Kabupaten Bandung. Informan dipilih menggunakan *purposive sampling* untuk memastikan keterlibatan individu di dalam peristiwa dan tempat yang terdampak di mana mereka tinggal. Partisipan terpilih terdiri dari orang-orang yang telah tinggal lebih dari dua puluh tahun, laki-laki dan perempuan dengan jumlah sepuluh orang yang terdiri dari warga dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interpretif dalam kerangka penelitian studi kasus. Tahapan analisis dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, display data, analisis pola dan interpretasi data, verifikasi serta kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan, pemerintah telah membuat program relokasi jangka pendek melalui tempat tinggal sementara, dan jangka panjang melalui relokasi dan tatakelola lingkungan (<https://bapenda.jabarprov.go.id>). Banjir yang semakin parah ditenggarai pihak pemerintah tidak hanya faktor alam, melainkan faktor perilaku ekologis masyarakat di sekitar wilayah bantaran, penggundulan hutan dan pembangunan rumah-rumah yang makin masif. Akibatnya, tekanan kepada lingkungan semakin besar dan berdampak pada kerusakan ekologi yang sangat parah. Data BPS 2025 memperlihatkan jumlah penduduk 280.369 orang, dengan kepadatan penduduk 6.888 jiwa/km<sup>2</sup> (<https://web-api.bps.go.id>).

Sementara dari hasil penelitian melalui wawancara memperlihatkan, bahwa mereka di daerah rawan banjir itu telah tinggal selama minimal dua dekade. Seluruh informan, telah tinggal di wilayah Bale Endah sejak lahir. Mereka menyaksikan, pada tahun 1984 banjir besar telah menggenangi Bale Endah serta desa-desa di sekitarnya, seperti Bojongsari dan Sapan. Setiap tahun mereka mengungsi, namun selalu kembali ke tempat tinggal mereka sesudah banjir mereka.

### **Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan banjir oleh pemerintah**

Pemerintah telah membangun posko penanggulangan banjir di antaranya alas tidur, sembako, makanan, perlengkapan dan susu bayi. Bantuan medis dilakukan dengan posko sementara, obat-obatan serta bantuan psikososial. Pengerukan Sungai Citarum dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak ketinggian banjir yang kerap dialami masyarakat ketika musim hujan tiba. Pendangkalan ini akibat tanah endapan dari sedimentasi juga bantaran sungai yang kian menyempit. Pemerintah juga membentuk Satgas Citarum Harum untuk tidak membuang sampah ke sungai.

*“Saya paham mengenai program pemerintah Citarum harum dan bersyukur ada upaya untuk membantu kami sebagai masyarakat terdampak” (Informan-1)*

*“Mungkin ada perilaku sebagian masyarakat kami yang salah, tapi banjir ini kan di antaranya akibat dari kiriman sampah dari wilayah lain, hutan-hutan digunduli, pemukiman yang makin banyak itu izinnya dari pemerintah juga kan?” (Informan-2).*

Temuan data ini memperlihatkan sikap positif masyarakat bahwa pesan-pesan lingkungan untuk membangun persepsi program pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak telah dirasakan oleh masyarakat, terutama di lokasi rawan bencana. Komunikasi lingkungan berperan di dalam membentuk sikap dan cara pandang masyarakat memahami masalah ekologis dan merespons dengan tindakan terhadap lingkungan. Komunikasi lingkungan dengan program Citarum Harum telah menciptakan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Tetapi, interpretasi masyarakat juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa kerusakan ekologis tidak hanya di tingkat lokal, namun menjalin dengan kerusakan ekologis di wilayah lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

### **Identitas sosial dan budaya masyarakat di lokasi rawan banjir**

Fenomena identitas sosial masyarakat di lokasi rawan banjir memperlihatkan solidaritas yang kuat, yang terbentuk melalui interaksi keseharian. Hasil wawancara dengan responden memperlihatkan, tujuh di antara mereka merasakan hubungan di antara mereka sangat erat. Mereka hadir dalam pengajian di masjid, dan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya bersama-sama. Selain itu, akar sejarah mereka telah terbentuk dalam budaya yang sama, *“silih asah-silih asuh-silih asih”* (saling mendidik/berbagi pengetahuan, saling membimbing, saling mengasahi).

*“Ya, keberatan juga kalau harus relokasi dan jauh. Di sini kan tanah warisan orang tua kami, dari lahir saya di sini. Mata pencaharian juga di sini. Orang-orang...tetangga-tetangga sudah seperti saudara...kita biasa saling bantu. Banjir datang setahun sekali sudah biasa dihadapi kami...berat, tapi mau gimana lagi” (Informan-6).*

*“Budaya gotong royong di sini kuat, kalau banjir ya kami saling menolong. Mungkin banyak orang bilang, kenapa enggak pindah saja? Kan kami orang bukan barang, kami ada ikatan emosi dengan lingkungan sosial dan alam di sini yang sudah puluhan tahun terbina” (Informan-8)*

Keputusan mereka untuk tetap tinggal di daerah rawan banjir bukan faktor ekonomi saja yang menjadi pertimbangan utama, melainkan terdapat dimensi sosial dan simbolik yang melekat pada ruang bersama dan menjadi memori kolektif. Resistensi relokasi juga disebabkan karena akar sejarah keluarga dan telah dihuni sejak lahir serta di tempat di sekitarnya merupakan sumber mata pencaharian utama. Solidaritas sosial yang telah terbangun selama puluhan tahun, serta kuatnya budaya gotong royong membuat alasan kuat bagi mereka untuk tetap tinggal dan menghadapi musibah banjir bersama-sama.

### **Partisipasi masyarakat saat bencana banjir dan relokasi**

Dalam situasi banjir yang berulang dari waktu ke waktu, masyarakat memiliki variasi respons yang menggambarkan kompleksitas kondisi sosial ekonomi. Dari sepuluh orang key informan, tujuh orang di antaranya menolak rencana relokasi, dua orang ragu-ragu dan satu orang menyatakan setuju untuk pindah.

*“Saya sudah terbiasa menghadapi banjir tiap tahun bersama tetangga. Tetap tinggal di sini saja” (Informan 3)*

*“Sudah biasa, jadi ya paham tiap tahun harus bagaimana..mengungsi dan kembali lagi ke sini” (Informan 4)*

*“Himbauan pemerintah tetap didengar, masalahnya solusinya kan dari tahun ke tahun tidak jelas juga...tetap banjir juga” (Informan 2)*

Dari temuan data, penolakan tidak dinyatakan secara eksplisit terhadap kebijakan pemerintah, tetapi lebih terlihat melalui sikap bertahan dan penerimaan terhadap kondisi lingkungan yang selama ini mereka alami. Meskipun ada di antaranya adanya rasa tidak percaya pada relokasi, pindah ke wilayah mana dan itu pun tidak semudah itu. Selain itu, terdapat pola berpikir, bahwa banjir akan selalu datang dan mereka akan kembali pada siklus yang sama untuk mengungsi, dan kembali ke rumah setelah kondisi membaik.

Dengan kata lain, masyarakat telah mengembangkan bentuk adaptasi berbasis pengalaman yang membuat mereka merasa mampu bertahan di lingkungan tersebut. Kondisi ini memperkuat keputusan sebagian warga untuk tetap tinggal, meskipun mereka menyadari bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir. Selain itu, terdapat pernyataan, bahwa masyarakat menangkap ketidakjelasan kebijakan penanganan banjir yang menjadi faktor-faktor penguat keputusan sebagian masyarakat untuk tetap tinggal di kawasan tersebut.

*“Sebenarnya, kalau relokasi itu tujuannya supaya kami lebih aman dari banjir, tentu kami akan lebih mengerti. Tapi kami juga bingung kalau harus pindah, karena pekerjaan saya ada di sini. Kalau pindah jauh, saya belum tahun bekerja apa nanti di tempat baru” (Informan 10).*

*“Kami tidak menolak relokasi, hanya masih ragu. Di sini keluarga dan tetangga sudah sangat dekat dan terhubung secara emosional. Kalau pindah, kami khawatir harus mulai lagi dari awal, baik dari segi pekerjaan maupun kehidupan sosial “ (Informan 5)*

Bentuk ambivalensi dari temuan data ini memperlihatkan ketidakjelasan sikap sebagian masyarakat. Informan tidak secara langsung menolak kebijakan pemerintah, namun mereka mengekspresikan ketidakpastian terkait keberlanjutan ekonomi dan jaringan sosial di lokasi baru. Sikap ini mencerminkan kondisi transisi psikologis masyarakat yang sedang mempertimbangkan manfaat keamanan lingkungan dari relokasi, tetapi juga mempertimbangkan potensi kehilangan sumber penghidupan dan relasi sosial yang terbentuk dalam jangka waktu lama. Sedangkan satu pernyataan menerima program relokasi karena melihat adanya risiko pada bencana banjir.

*“Kalau menurut saya, relokasi itu memang penting. Kami sudah sering kebanjiran di sini. Hampir setiap musim hujan pasti air masuk rumah. Kalau pemerintah menyediakan tempat tinggal yang lebih aman dan layak, saya siap pindah. Yang penting kami bisa hidup tenang, dan anak-anak aman serta tidak khawatir lagi” (Informan 7)*

Temuan data tersebut menunjukkan sikap persetujuan representasi masyarakat yang pro relokasi karena kesadaran terhadap risiko terhadap bencana yang berulang serta harapan mendapatkan tempat tinggal dan wilayah yang lebih baik. Informan menilai bahwa relokasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi kerentanan terhadap banjir yang selama ini menjadi bagian pengalaman hidup masyarakat di bantaran sungai.

## **Pembahasan**

Dalam kerangka Teori Interaksi Simbolik, identitas individu terbentuk karena adanya proses interaksi yang intens dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Makna sebuah tempat dibangun melalui pengalaman kolektif, simbol, praktik sosial dan praktik budaya yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks masyarakat yang memiliki akar sejarah sejarah sejak lahir dan leluhur mereka berada di wilayah tersebut, akan menciptakan ikatan emosi dengan tempat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa memori kolektif sangat berpengaruh pada identitas sosial dan budaya (Ma et al., 2022). Ikatan emosi itu diperkuat dengan gotong royong, hubungan emosional antar masyarakat dan juga adanya hubungan kekerabatan serta pengalaman menghadapi banjir bersama-sama membentuk makna simbolik terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Tempat-tempat yang menyimpan kenangan berfungsi sebagai lokasi topografi dan metaforis yang sarat dengan fungsi memori spesifik oleh komunitas (Santhosh, 2025).

Dalam perspektif komunikasi simbolik, sungai dan lingkungan bantaran adalah ruang tempat membangun ikatan emosi, ikatan kolektif dan makna identitas. Karenanya, interaksi antara ingatan dan tempat memperkuat identitas dan ingatan akan tempat bagi mereka yang mendiami tempat tersebut (Ma et al., 2022).

Makna tempat bagi masyarakat yang terdampak banjir betapa pun rumit situasinya, mereka akan tetap terkenang dan terikat secara emosional. Bagaimana pun identitas kolektif dibangun dan dipertahankan berdasarkan ikatan emosional yang tumbuh di antara anggota

kelompok terhadap tempat tersebut. Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar interaksionisme simbolik, tempat dapat disebut sebagai fondasi identitas dan bermakna (Azarian, 2023).

Hubungan emosional antara manusia dan suatu lokasi fisik sarat dengan makna sosial dan budaya menyediakan jangkar spasial untuk pembentukan memori dan pengalaman emosional (Ma et al., 2022). Itu sebabnya mengapa orang-orang terdampak di wilayah rawan banjir meskipun mengetahui apa yang akan terjadi setiap tahun, mereka enggan untuk relokasi.

Program pembangunan dalam komunikasi partisipatoris, keberhasilannya bergantung kepada partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi untuk pengambilan keputusan. Pernyataan masyarakat dapat dipahami dari cara mereka memosisikan diri di samping menerima kebijakan pemerintah, juga sebagai pihak yang memiliki pengalaman, pengetahuan lokal, serta pandangan kritis terhadap penanganan banjir.

Mereka juga berupaya untuk menilai dan merespons kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Ketika masyarakat tidak sepenuhnya menolak komunikasi yang telah disampaikan oleh pemerintah, dan mereka mengevaluasi efektivitas kebijakan secara reflektif. Dalam Teori Komunikasi Parsipatoris Freire, komunikasi pembangunan tidak seharusnya berlangsung secara satu arah dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga perlu berlangsung dialogis (Altamirano, 2020; Cocco & Caimi, 2021; Suzina & Tufte, 2020).

Di sisi lainnya masyarakat juga berperan sebagai subjek yang memiliki suara di dalam proses pengambilan keputusan. Dialog dipandang sebagai hal penting untuk pengembangan kesadaran kritis, di mana individu menjadi sadar akan kondisi sosial mereka dan dapat secara aktif berpartisipasi dalam mentransformasikannya (Suzina & Tufte, 2020). Ketika pemerintah membuat sebuah program relokasi, tetap masyarakat mendengarkan rencana tersebut. Namun karena solusi yang diberikan belum jelas karena banjir tetap berlangsung setiap tahun. Dalam konteks Teori Komunikasi Parsipatoris masih terjadi dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi masyarakat juga mengevaluasi efektifitas berdasarkan kebijakan empiris yang mereka alami.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah, namun pembenahan bantaran sungai perlu menyentuh komunikasi lingkungan, di mana masyarakat dan pemerintah perlu membentuk pemahaman bersama mengenai lingkungan, risiko bencana serta tanggung jawab kolektif di dalam mengelola ekosistem. Pengerukan untuk mengatasi pendangkalan akibat sedimentasi, pembentukan satuan tugas dalam rangka meningkatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Pada dasarnya, bentuk komunikasi lingkungan yang lebih pragmatis, yaitu upaya pemerintah untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlanjutan ekosistem sungai. Melalui kampanye lingkungan, himbauan kebersihan sungai, serta program rehabilitasi sungai, pemerintah berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa permasalahan banjir menjalin erat dengan kondisi ekologi sungai yang mengalami kerusakan.

Penelitian ini menemukan ada kesenjangan persepsi masyarakat dengan kebijakan pemerintah dan pengalaman masyarakat di lapangan, ini disebabkan karena persoalan banjir adalah masalah yang sangat kompleks dibandingkan dengan narasi kebijakan yang sering menekankan perilaku masyarakat sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan. Dalam kerangka komunikasi lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Pezullo & Cox (2018), komunikasi mengenai isu lingkungan berfungsi sebagai penyampaian kebijakan. Selain itu untuk membentuk wacana, mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Karenanya, penelitian ini menemukan persoalan banjir merupakan fenomena yang melibatkan interaksi antara dimensi sosial, ekologis dan komunikasi.

Persoalan banjir tidak dapat direduksi sebagai persoalan teknis lapangan atau perilaku masyarakat, tetapi juga dari perspektif fenomena sosial-ekologis yang dibentuk melalui interaksi antara kebijakan pembangunan, kondisi ekologis sungai, serta praktik sosial masyarakat yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Narasi kebijakan yang menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat, misalnya melalui kampanye kebersihan sungai atau larangan membuang sampah ke sungai adalah strategi komunikasi pragmatis. Namun temuan lapangan memperlihatkan banjir sebagai konsekuensi dari proses ekologis dan pembangunan yang lebih luas, termasuk kerusakan kawasan hulu, perubahan tata guna lahan, serta pemukiman yang tidak terkendali. Integrasi antara perspektif interaksi simbolik dan komunikasi partisipatori menjadi lensa analisis untuk memahami dinamika hubungan antara tempat, masyarakat, dan kebijakan lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Makna tempat bagi masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Citarum Bale Endah adalah sebagai ruang fisik dan juga ruang simbolik yang membentuk identitas sosial dan budaya komunitas. Tempat tinggal yang telah dihuni bertahun-tahun secara turun temurun mengandung memori kolektif, pengalaman bersama, relasi sosial yang memperkuat keterikatan emosional masyarakat terhadap lingkungan tersebut. Pengalaman menghadapi banjir yang berulang menjadi bagian dari pengalaman kolektif yang memperkuat solidaritas sosial, serta kekerabatan antar warga. Selain itu terdapat faktor ekonomi yang berkaitan dengan mata pencaharian dan kemudahan akses secara geografis yang menunjang kehidupan sosial mereka. Sehingga tempat tersebut menjadi ruang yang sarat makna simbolik sehingga masyarakat cenderung mempertahankan keberadaannya meskipun menghadapi bencana banjir setiap tahun.

Kebijakan relokasi yang berfokus pada aspek teknis dan lingkungan berpotensi mereduksi dimensi simbolik yang membentuk keterikatan kepada tempat tinggal tempat konstruksi sosial yang membentuk identitas sosial dan budaya. Karenanya kebijakan penanganan banjir di samping perlu mempertimbangkan risiko ekologis, juga perlu pertimbangan pemahaman ruang, relasi sosial dan identitas yang telah berakar di wilayah rawan banjir tersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH (Apabila Diperlukan)**

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aksan, N., Kisac, B., Aydin, M., & Demirbuken, S. (2009). Symbolic interaction theory. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 902–904.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.160>
- Altamirano, A. F.-A. (2020). The importance of paulo freire to communication for

- development and social change. In *Handbook of Communication for Development and Social Change* (pp. 309–327). [https://doi.org/10.1007/978-981-15-2014-3\\_76](https://doi.org/10.1007/978-981-15-2014-3_76)
- Anita, J., Kustianingrum, D., Haerdy, R. S. M., Naazhir, M. N., & Kaivalya, L. P. (2025). Government and community responses for sustainability of flood-prone village in Lamajang Peuntas, Dayeuhkolot, Bandung Regency, West Java Province, Indonesia. *AIP Conference Proceedings*, 3351(1). <https://doi.org/10.1063/5.0300363>
- Azarian, R. (2023). Social construction of places as meaningful objects: a symbolic interactionist approach. *International Review of Sociology*, 33(3), 546–564. <https://doi.org/10.1080/03906701.2023.2259060>
- Carrasco, S., & Dangol, N. (2019). Citizen-government negotiation: Cases of in riverside informal settlements at flood risk. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101195>
- Cocco, R., & Caimi, F. E. (2021). A pedagogical movement and the pedagogic in movement: Freirean strands of communication and community broadcasting. *Praxis Educativa*, 16. <https://doi.org/10.5212/PRAXEDUC.V.16.16319.007>
- Das, A., & Sahoo, S. N. (2025). Impact of land use and climate change on urban flooding: a case study of Bhubaneswar city in India. *Natural Hazards*, 121(7), 8655–8674. <https://doi.org/10.1007/s11069-025-07130-5>
- Degeai, J.-P., Blanchemanche, P., Tavenne, L., Tillier, M., Bohbot, H., Devillers, B., & Dezileau, L. (2022). River flooding on the French Mediterranean coast and its relation to climate and land use change over the past two millennia. *Catena*, 219. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106623>
- Duijn, M., Rijnveld, M., & van Rooy, P. (2006). Public Participation in Flood Control Areas. *Studies in Regional Science*, 36(4), 945–959. <https://doi.org/10.2457/srs.36.945>
- Goh, K. (2019). Urban Waterscapes: The Hydro-Politics of Flooding in a Sinking City. *International Journal of Urban and Regional Research*, 43(2), 250–272. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12756>
- Harris, U. S. (2025). Recovery and resilience in the Manning valley through a participatory environmental communication lens. *Media International Australia*, 195(1), 7–20. <https://doi.org/10.1177/1329878X241300769>
- Kombaitan, B., Yudoko, G., & Purboyo, H. (2018). Application of gis on determination of flood prone areas and critical arterial road network by using chaid method in bandung area. *MATEC Web of Conferences*, 147. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201814702007>
- Korkmaz, M. (2022). Flood Recurrence Calculation and Flood Risk Assessment in Rivers. *El-Cezeri Journal of Science and Engineering*, 9(2), 532–541. <https://doi.org/10.31202/ecjse.974134>
- Lincoln, Y.S., Guba, Egon G. (1985) *Naturalistic Inquiry*. Sage.
- Lo, W., Huang, C.-T., Wu, M.-H., Doong, D.-J., Tseng, L.-H., Chen, C.-H., & Chen, Y.-J. (2021). Evaluation of flood mitigation effectiveness of nature-based solutions potential cases with an assessment model for flood mitigation. *Water (Switzerland)*, 13(23). <https://doi.org/10.3390/w13233451>

- Ma, Y., Qian, J., & Tang, X. (2022). The Construction of Place in Red Tourism Destinations Based on Collective Memory: A Case Study of the Xinzhuan Red Army Village, Binchuan, Yunnan. *Tropical Geography*, 42(6), 997–1008. <https://doi.org/10.13284/j.cnki.rddl.003492>
- Mehmood, A., Jia, S., Lv, A., Zhu, W., Mahmood, R., Saifullah, M., & Adnan, R. M. (2021). Detection of spatial shift in flood regime of the kabul river basin in pakistan, causes, challenges, and opportunities. *Water (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/w13091276>
- Pezullo, Phaedra., Cox, Robert. (2018). *Environmental communication and the public sphere*. Sage.
- Santhosh, L. P. (2025). Paradesi's Jewish Soul: A Tapestry of Memories Woven in Stone and Spirit. In *Recall and Retell: Literary Registers of Memory, Identity, and Resistance in India* (pp. 57–74). <https://doi.org/10.4324/9781003602712-6>
- Suzina, A. C., & Tufte, T. (2020). Freire's vision of development and social change: Past experiences, present challenges and perspectives for the future. *International Communication Gazette*, 82(5), 411–424. <https://doi.org/10.1177/1748048520943692>
- Wachinger, G., Keilholz, P., & O'Brian, C. (2018). The Difficult Path from Perception to Precautionary Action—Participatory Modeling as a Practical Tool to Overcome the Risk Perception Paradox in Flood Preparedness. *International Journal of Disaster Risk Science*, 9(4), 472–485. <https://doi.org/10.1007/s13753-018-0203-8>
- Wijaya, T., & Wijayanti, Y. (2024). Flood Mapping Using HEC-RAS and HEC-HMS: A Case Study of Upper Citarum River at Dayeuhkolot District, Bandung Regency, West Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1324(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1324/1/012103>
- Zurqani, H. A., Al-Bukhari, A., Alzurqani, S. A., Alkhboli, M. E. M., & Bataw, A. A. (2025). An Overview of Flood Hazards in Libya: Impacts and Required Actions. In *Springer Water: Vol. Part F104* (pp. 143–161). [https://doi.org/10.1007/978-3-031-80920-0\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-80920-0_8)